

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat membantu pemerintah dalam menggali sumber penghasilan daerah, dengan adanya pajak daerah pembangunan yang dilaksanakan akan lebih optimal, sebab pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat tetapi kemampuan daerah itu sendiri, bahkan boleh jadi pajak daerah bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan. Oleh karena pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, maka pajak daerah perlu dikelola secara profesional dan transparan.

Salah satu sumber pungutan pajak daerah adalah pajak hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan untuk menginap atau beristirahat bagi pengunjung, baik yang berasal dari luar negeri maupun domestik. Kemudian biaya penginapan para pengunjung terhadap hotel tempat mereka menginap dimasukkan menjadi pajak sebagai pemasukan bagi daerah, hal tersebut telah diatur dalam UU No.34 tahun 2000.

Kota Bandar Lampung merupakan Kota terbesar di Lampung dan salah satu Kota besar sebagai pusat perekonomian masyarakat Lampung. Kota Bandar Lampung termasuk salah satu daerah otonom yang melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Keunggulan lain dari Kota Bandar Lampung adalah terdapat banyak fasilitas-fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap, apalagi disetiap tahun banyak

pembangunan hotel dan infrastruktur, hal ini menjadikan potensi merealisasikan pembangunan Kota Bandarlampung membutuhkan tersedianya dana yang cukup besar, baik itu yang berasal dari kekuatan pemerintah daerah Kota Bandarlampung sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandarlampung harus mengoptimalkan sumber pendanaan dan penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak daerah dalam hal ini pajak hotel merupakan salah satu sub komponen dari Pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Dimana Pajak hotel memberikan peran penting dan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jika kita melihat data ketersediaan hotel di Bandarlampung dari tahun-ketahun, ini sangat menggembirakan karena selalu mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang
di Kota Bandarlampung

No	Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non bintang	Jumlah
1.	2017	15	83	98
2.	2018	15	85	100
3.	2019	20	90	110
4.	2020	21	91	112
5.	2021	23	95	118

Sumber: BPS Kota Bandarlampung Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah hotel baik yang berbintang maupun non bintang mulai tahun 2018 – 2021 mengalami pertumbuhan, meskipun pada tahun 2020 pandemi covid 19 melanda, pertumbuhan hotel tetap berlangsung, ini menandakan

bahwa pembangunan di kota Bandarlampung masih bisa bertahan dan tumbuh meskipun di terjang pandemi. Pertumbuhan hotel baik secara kuantitas maupun kualitas yang begitu signifikan di kota Bandarlampung, menarik perhatian pemerintah kota dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menganggap serius Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak hotel. Adapaun data pertumbuhan hotel di kota Bandarlampung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Hotel di Kota Bandarlampung tahun 2021

No	Kecamatan/Subdistrict	Hotel
1.	Teluk Betung Barat	1
2.	Teluk Betung Timur	1
3.	Teluk Betung Selatan	4
4.	Bumi Waras	6
5.	Panjang	3
6.	Tanjung Karang Timur	6
7.	Kedamaian	18
8.	Teluk Betung Utara	17
9.	Tanjung Karang Pusat	13
10.	Enggal	20
11.	Tanjung Karang Barat	5
12.	Kemiling	2
13.	Langkapura	-
14.	Kedaton	4
15.	Rajabasa	4
16.	Tanjung Senang	-
17.	Labuhan Ratu	1
18.	Sukarame	1
19.	Sukabumi	2
20.	Way Halim	10
Total Bandarlampung		118

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandarlampung 2021

Apa yang dilakukan oleh BPPRD kota Bandarlampung ini sejalan dengan apa yang dilakukan kota-kota lain di seluruh nusantara, dalam upaya peningkatan PAD yang bersumber dari pajak hotel.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang berisikan undang undang perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh masyarakat pribadi atau badan yang terkait, dengan sifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan dan anggaran negara yang berdampak langsung pada kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur atau pembangunan apapun yang berguna bagi masyarakat disetiap daerah kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang dihimpun dan dipunggut dari pajak. Dengan itu pemungutan dan penerimaan pajak perlu di optimalkan dengan baik.

Di setiap daerah sering terjadi masalah terbatasnya dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau fasilitas masyarakat, dengan permasalahan seperti itu maka setiap daerah memerlukan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah tersebut. dan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mencari sumber pendanaan dan pendapatan daerah yang berpotensi tinggi dan harus ada ketergantungan pada bantuan pusat seminimal mungkin. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang ditetapkan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipunggut disetiap daerah, dan dana tersebut bersumber dari pajak yang dikelola oleh pemerintah diantaranya adalah pajak hotel.

Adanya kontribusi pajak hotel maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPPRD) kota Bandarlampung dapat mengetahui seberapa besar peran pajak hotel pada pendapatan daerah, sehingga pengelola pajak pada setiap tahunnya dapat di evaluasi dan mengkaji ulang di bidang pajak hotel sehingga tidak ada pengusaha yang lolos dari pengenaan pajak tersebut.

Untuk mengetahui sebesar apa kontribusi pajak hotel terhadap PAD, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengadakan kajian kontribusi pajak hotel diantaranya adalah kajian kontribusi pajak hotel terhadap PAD DKI Jakarta yang dilakukan oleh Apriani (2017) menggunakan data kuantitatif berupa data pajak hotel dan data pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Menghasilkan data yang mewakili kontribusi pajak hotel. Realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun meningkat terhadap pendapatan asli daerah, namun besaran kontribusi pajak hotel dari tahun ke tahun semakin menurun. Karena PAD bukan hanya pajak hotel, tetapi juga sektor pariwisata yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), mempengaruhi hasil pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak kontribusi lainnya. Secara keseluruhan rata – rata kontribusi pajak hotel untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 38,6% dari tahun 2010 hingga tahun 2014 sisanya 61,4% bersumber dari penerimaan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Eka Putra (2019) mengenai kontribusi pajak hotel terhadap APBD Kota Batam dari tahun 2014-2018, mendapatkan hasil bahwa persentase kontribusi tertinggi dari penerimaan pajak hotel, hanya mencapai 10.18%, sedangkan hasil penelitian analisis efektifitas menunjukkan bahwa pada

tahun 2014-2018 tingkat efektifitas pajak hotel, mengalami fluktuatif. Presentase tertinggi efektifitas pajak hotel, yaitu pada tahun 2014 dengan nilai 115.59%.

Penelitian serupa dilakukan oleh Elli Fitriani et al. (2021) tentang analisis pengaruh pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui, penelusuran literatur dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitiannya, rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dikatakan tidak berhasil, Rata-rata efektivitas pajak hotel tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat efektif, dan untuk rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Perbedaan dari ketiga temuan dari penelitian tersebut di atas baik yang di kota jakarta (Apriani, 2017), batam (Rizki, 2019) maupun kota metro (Elli dkk, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan hotel tidak sebanding dengan kontribusi terhadap PAD, padahal kalau bisa di kelola dengan baik, tentu saja pertumbuhan hotel idealnya berbanding lurus dengan PAD. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Pemda Kota Bandarlampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimanakah kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli kota Bandarlampung dari tahun 2017 ke tahun 2021?
- 2) Bagaimanakah efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli kota Bandarlampung dari tahun 2017 ke tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau riset pada umumnya untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian penulis ini adalah :

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandarlampung kurun waktu 2017-2021.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung kurun waktu 2017 -2021.

1.4 Motivasi Penelitian

Motivasi penulis meneliti efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap APBD kota Bandarlampung adalah adanya fenomena bahwa kota Bandarlampung sebagai ibu kota provinsi, pusat industri dan perdagangan, sekaligus kota pendidikan dan pariwisata memperlihatkan pertumbuhan hotel yang signifikan baik bintang maupun non bintang, apakah fenomena ini berbanding lurus dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD, atau pertumbuhan hotel yang ada kurang berkontribusi terhadap PAD seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2017) di kota Jakarta, Rizki (2019) di kota Batam dan Elli (2021) di kota Metro.

1.5 Manfaat Penelitian

Selanjutnya diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kelebihan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak hotel khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Bandarlampung.
- 2) Warga diharapkan dapat memberikan informasi pajak hotel di wilayah kota Bandarlampung.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan penerimaan daerah dari penerimaan pajak hotel.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak terlalu luas atau menyimpang, ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas, kontribusi, pajak hotel, dan pendapatan daerah.

1.6.2 Batasan Penelitian

Adapun yang menjadi batasan penelitian ini adalah :

- a. Kurun waktu pajak hotel yang di ambil adalah tahun 2017 – 2021
- b. Jumlah hotel yang terdata di BPPRD Kota Bandarlampung tahun 2017-2021.

- c. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas (Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel) dan variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah/PAD)
- d. Data penelitian diambil dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini berpijak kepada Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia, sehingga semua yang tertuang dalam penulisan ini tidak keluar dari ketentuan. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian motivasi, ruang lingkup penelitian, dan deskripsi sistem penulisan.

BAB II Landasan Teori Dan Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variable dan pengukuran serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini penutup yang berisi hasil ahir penelitian.yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat di jadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.